

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi masalah global yang belum terselesaikan hingga hari ini. Kemiskinan merupakan kondisi individu atau kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan memiliki keterbatasan untuk memperoleh kehidupan yang layak. Kemiskinan memberikan batasan terhadap potensi individu yang menyebabkan ketidakberdayaan secara berkelanjutan (Sen, 1999). Kemiskinan yang masih menjadi masalah global memberikan dampak luas terhadap kualitas hidup dan pembangunan berkelanjutan. Individu yang berada dibawah garis kemiskinan cenderung kesulitan untuk memperoleh kehidupan secara layak. Ketidakmampuan individu untuk melepaskan diri dari masalah ini akan mengakibatkan terbentuknya lingkaran yang terus berulang pada setiap generasi dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan global (Todaro & Smith, 2015)

Berdasarkan data terbaru diperkirakan pada tahun 2024 ini hampir 700 orang di Dunia masih hidup dengan kurang dari \$2,15 per hari. Diperkirakan sebanyak 122 wanita dan 100 pria dengan rentang usia 25 hingga 34 tahun, serta lebih dari 160 juta anak berada dalam lingkaran kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. (United Nations, 2025). Sebelum terjadinya pandemi, diketahui sebanyak 10% populasi global hidup dalam garis kemiskinan yang ekstrim dengan ketidakmampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan sanitasi.

World Health Organization (WHO) 2017, melaporkan bahwa layanan kesehatan dasar dan biaya perawatan kesehatan tidak dapat dijangkau oleh setengah dari populasi global, akibatnya penyakit seperti malaria, cacar, TBC, dan diare umum terjadi yang mempertinggi angka kematian. Selain itu, terdapat sekitar 2,2 miliar masyarakat global tidak memiliki akses layanan air bersih dan sekitar 3,5

miliar orang juga kekurangan fasilitas sanitasi dasar yang menyebabkan dampak berkelanjutan pada masalah penularan penyakit (TIME, 2025). Pada ranah pendidikan, UNESCO melaporkan pada tahun 2023 sekitar 249 juta anak dan remaja yang berusia 6 sampai 18 tahun tidak mengenyam bangku pendidikan (WINSS, 20204). Kebutuhan dasar lain seperti tempat tinggal juga masih sangat berada di angka yang rendah, sekitar 1,6 miliar orang di seluruh dunia masih belum dapat memenuhi kebutuhan hunian yang layak. Angka ini diperkirakan akan terus meningkat menjadi 3 miliar orang pada tahun 2030 mendatang (UNHumanRightsOffice, 2025).

Dampak yang disebabkan oleh kemiskinan juga erat kaitannya dengan aspek psikologis. Individu dengan tekanan ekonomi tinggi rentan mengalami stres dan depresi. Kekhawatiran yang terjadi pada individu dengan tingkat pendapatan dan pendidikan yang rendah akan ketidakpastian serta perasaan tidak berdaya meningkatkan kadar kortisol yang berpengaruh pada kesehatan mental (Haushofer & Fehr, 2014). Kemiskinan dan masalah kesehatan mental memiliki hubungan kausal dua arah, individu dengan pendapatan yang rendah memiliki risiko sekitar 1,5 hingga 3 kali lipat lebih tinggi untuk mengalami gangguan kesehatan mental (Ridley et al., 2020). Pada negara-negara berpenghasilan rendah hingga menengah, kemiskinan dan kesehatan mental memiliki hubungan timbal balik, sehingga menjadi tantangan mendesak untuk ditangani (Lund et al., 2010).

Berkaca dari berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kemiskinan, *Sustainable Development Goals (SDGs)* di tahun 2024 lalu telah melakukan pembahasan tentang isu global serta penguatan komitmen yang salah satu pencapaiannya adalah mengurangi angka kemiskinan dunia. Mengentaskan kemiskinan menjadi langkah penting untuk mewujudkan prinsip “*no one left behind*” yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan yang layak dan tidak boleh tertinggal dalam proses pembangunan berkelanjutan. Usaha pemberantasan kemiskinan perlu digencarkan dalam mewujudkan pembangunan dunia yang lebih inklusif karena kehidupan yang layak untuk setiap individu merupakan bagian dari keadilan, kemanusiaan, perdamaian dan keamanan global (Alkire & Santos, 2014; Narayan et al., 2000). Namun pada kenyataannya,

diperkirakan target global untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 tidak dapat tercapai karena berbagai faktor.

Indonesia yang memiliki komitmen kuat terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* juga masih belum mampu terlepas dari permasalahan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat penurunan persentase penduduk miskin pada 2024 sebesar 0,46%. Jumlah penduduk miskin per September 2024 sebesar 24,06 juta jiwa, mengalami penurunan sebanyak 1,16 juta jiwa dibandingkan pada Maret 2024. Meskipun terjadi penurunan, namun angka tersebut juga tidak dapat dipandang sebelah mata, bahkan Indonesia juga masih berada di 100 negara termiskin di Dunia (AntaraNews, 2022).

Kemiskinan masih menjadi masalah yang merata di wilayah Indonesia. Dilansir dari Badan Pusat Statistik diketahui angka kemiskinan di wilayah pedesaan Indonesia mencapai 11,34% atau setara dengan 13,01 juta jiwa. Sedangkan, pada masyarakat perkotaan berada di angka 6,66% atau setara dengan 11,05 juta jiwa pada September 2024. Di Jakarta sendiri, yang juga merupakan pusat pemerintahan dan sentra bisnis masih belum sepenuhnya terlepas dari permasalahan ini. Dikutip dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2024 terdapat 449,07 ribu orang atau setara dengan 4,14% penduduk di Jakarta masih berada dalam kategori miskin. Hal tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan perekonomian yang dialami oleh masyarakat Jakarta.

Jakarta sebagai pusat perekonomian digambarkan memiliki peluang lapangan kerja yang lebih luas, penyedia layanan dasar yang lebih baik serta kemudahan-kemudahan yang ditawarkan. Masyarakat dari setiap penjuru daerah berbondong-bondong melakukan urbanisasi dengan harapan meningkatkan perekonomian keluarga. Alih-alih mengurangi kemiskinan, urbanisasi yang tidak terencana dengan matang serta keterbatasan lapangan kerja formal justru memperluas kantong-kantong kemiskinan dan memperburuk kesenjangan sosial yang ada di wilayah perkotaan. Sehingga, banyak dari penduduk terpaksa bekerja di sektor informal untuk bertahan hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui per Februari 2024 sebanyak 1,84 juta orang atau sekitar 46,06% penduduk

DKI Jakarta terlibat dalam kegiatan informal, hal ini mengalami peningkatan sebanyak 1,28% dibandingkan pada Februari 2023.

Pekerja sektor informal umumnya mengalami ketidakstabilan kondisi kerja karena keterbatasan akses terhadap perlindungan kerja dan jaminan sosial (Retnaningsih, 2020). Tidak adanya kontrak kerja dibawah perlindungan hukum yang pasti, upah yang tidak menentu serta tidak dilengkapi dengan tunjangan kesehatan maupun hari tua membuat kelompok pekerja informal mengalami kerentanan sosial maupun ekonomi (Kartiasih et al., 2023a; Kartiasih et al., 2023b). Keterbatasan tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu saja, melainkan juga berkontribusi terhadap kesenjangan struktural yang kian melebar di masyarakat wilayah perkotaan. Karakteristik unik yang dimiliki wilayah perkotaan juga cenderung mempengaruhi kerentanan biologis, sosial, dan lingkungan yang berdampak negatif pada kesehatan mental (Lecic-Tosevski, 2019).

Individu yang tinggal di wilayah perkotaan menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi di area otak seperti *amigdala* dan *cingulate anterior cortex* sehingga berpotensi meningkatkan kecemasan dan stres (B. E. Evans et al., 2018; Lederbogen et al., 2011; Sudimac et al., 2022). Kelompok pekerja informal di wilayah perkotaan yang berpenghasilan rendah cenderung memiliki risiko paling rentan terhadap permasalahan psikologis akibat adanya tekanan yang tinggi akan pemenuhan kebutuhan (Lecic-Tosevski, 2019; Lugova et al., 2021). Hal tersebut sangat memungkinkan untuk menimbulkan permasalahan baru, seperti individu yang terjebak dalam kemiskinan kerap mengambil langkah instan untuk membebaskan dirinya. Padahal, pengambilan keputusan yang kurang tepat memiliki risiko signifikan terhadap kesejahteraannya pada masa mendatang.

Pada pekerja informal, dalam tekanan pemenuhan kebutuhan harian, lebih memungkinkan untuk memilih penghasilan harian secara cepat dengan risiko yang tinggi dibandingkan melakukan investasi waktu, misalnya mengikuti pelatihan pengembangan keterampilan untuk peluang jangka panjang. Selain itu, keputusan-keputusan yang merugikan secara ekonomi juga memungkinkan untuk dilakukan, seperti pengambilan dana pinjaman dengan bunga yang tinggi atau terjerumus dalam praktik judi *online*. Cara pandang individu terhadap nilai waktu juga berkaitan dengan pemrosesan pengambilan keputusan dalam sistem kognitif.

Individu yang lebih menghargai keuntungan jangka pendek dibandingkan manfaat jangka panjang cenderung membuat keputusan finansial yang tidak maksimal (Suharsono et al., 2023) konsep dalam pengambilan keputusan ekonomi yang memiliki kaitan dengan penilaian individu terhadap imbalan masa depan dibandingkan imbalan saat ini disebut dengan diskonto waktu (Shane Frederick, George Loewenstein, 2002).

Pada penelitian terdahulu yang dengan judul "*On the Psychology of Poverty*" mengungkapkan hasil berupa individu yang berada dalam lingkaran kemiskinan, cenderung mendiskontokan prioritas di masa depan. Hal ini dikarenakan adanya tekanan akan kebutuhan yang menyebabkan stres dan permasalahan psikologis sehingga mendorong individu untuk memperoleh imbalan jangka pendek sebanyak-banyaknya dibandingkan melakukan investasi pendidikan dan kesehatan di masa depan yang berdampak pada terjebakanya individu dalam lingkaran kemiskinan (Haushofer & Fehr, 2014). Sejumlah studi juga membahas mengenai diskonto waktu yang berkaitan erat dengan refleksi kognitif (Lempert & Phelps, 2016). Individu yang memiliki kapasitas refleksi kognitif yang tinggi cenderung lebih mampu menahan dorongan untuk memperoleh kepuasan segera, dan lebih memilih imbalan yang lebih besar di masa depan, begitu juga sebaliknya (Cheng & Janssen, 2019; Cueva et al., 2016).

Refleksi kognitif kapasitas individu untuk mengendalikan respons impulsif yang muncul dan mengubahnya dengan respons yang lebih rasional, analitis dan terstruktur. Situasi penuh ketidakpastian serta tekanan finansial yang dialami oleh kelompok pekerja informal cenderung mempengaruhi sistem kognitif individu dalam pengambilan keputusan. Sistem kognitif yang terlibat adalah sistem rasional dan intuitif (J. Evans & Stanovich, 2013; Kahneman, 2003; Lindell, 2014). Individu yang berada dalam kondisi stres lebih memungkinkan untuk mengandalkan sistem intuitifnya karena sistem rasional membutuhkan lebih banyak sumber daya kognitif (Kahneman, 2011). Dalam penentuan keputusan finansial, kondisi psikologis seperti emosional, pengalaman, harapan serta sifat optimis memiliki banyak peran atas motivasi dan sumber kekeliruan individu dalam mengambil keputusan (Hidayati, 2018).

Bagi pekerja informal yang menghadapi ketidakpastian ekonomi, harapan membantu menjaga orientasi masa depan dan memperkuat kecenderungan untuk menunda kepuasan demi hasil jangka panjang. Harapan merujuk pada kapasitas individu untuk menetapkan tujuan, merancang strategi untuk mencapainya (*pathways thinking*), serta memiliki motivasi untuk bergerak menuju tujuan tersebut (*agency thinking*) (Snyder C., 1991). Individu dengan tingkat harapan yang tinggi cenderung lebih mampu menjaga fokus pada hasil jangka panjang, meskipun menghadapi tekanan dan hambatan. Hal ini sejalan dengan *teori ekspektansi* oleh Vroom, yang menyatakan bahwa motivasi terbentuk ketika seseorang meyakini bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja, dan kinerja tersebut akan menghasilkan imbalan yang bernilai (Vroom, 1964).

Refleksi kognitif tidak berjalan efektif dalam mempengaruhi tingkat diskonto waktu individu tanpa dukungan motivasi yang sesuai. Dalam hal ini, harapan menjadi bagian penting yang dinilai mampu memoderasi pengaruh antara refleksi kognitif dan kecenderungan individu memilih imbalan jangka pendek. Harapan menggambarkan keyakinan dan kegigihan individu untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Individu dengan harapan yang tinggi dinilai mampu menunda kepuasan dan memiliki kegigihan untuk memperoleh hasil usahanya di masa mendatang. Sebaliknya, individu dengan harapan rendah cenderung tidak melihat manfaat dari penundaan kepuasan.

Penelitian yang mengkaji harapan sebagai variabel moderator dalam hubungan antara refleksi kognitif dan diskonto waktu belum banyak dilakukan. Sehingga, Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui peran harapan dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan. Dengan meningkatkan harapan sebagai motivasi, diharapkan dapat memberikan solusi terhadap pemutusan rantai kemiskinan di wilayah perkotaan yang diakibatkan oleh rendahnya refleksi kognitif yang mempengaruhi diskonto waktu.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang pada penelitian ini, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan

masih belum menemukan solusi

2. Karakter perkotaan yang unik menyebabkan perbedaan tantangan dalam menghadapi fenomena *Poverty trap*
3. Masyarakat miskin dengan tingkat refleksi kognitif yang rendah cenderung mendiskontokan waktu dan menghasilkan keputusan intuitif
4. Belum banyak penelitian yang mengkaji *harapan* sebagai variabel moderator dalam hubungan antara refleksi kognitif dan diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan. individu

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penelitian ini berfokus dan membatasi masalah pada peran harapan dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian hal-hal di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah harapan memiliki peran dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disajikan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran harapan dalam memoderasi pengaruh refleksi kognitif terhadap diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Secara teori, manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman tentang harapan, refleksi kognitif dan diskonto waktu pada masyarakat miskin perkotaan. Menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut serta menyediakan kontribusi bagi pengembangan teori dalam psikologi sosial.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti selanjutnya
 - a. Penelitian ini dapat memberikan referensi baru bagi peneliti lain yang

hendak menelusuri lebih lanjut tentang harapan, refleksi kognitif dan diskonto waktu.

2. Bagi masyarakat
 - a. memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang pentingnya pengambilan keputusan. Dengan meningkatkan kesadaran akan dampak positif dari harapan, masyarakat diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi jangka panjang.
3. Bagi pemerintah
 - a. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan program intervensi yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan.

